

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut.

4.1.1 Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara umum dapat dikatakan berhasil karena sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 5 (lima) dimensi dalam Perwal No. 24 Tahun 2021, yaitu pada dimensi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, Fasilitas Pertanian Perkotaan, *Urban Farming Corner*, *Monitoring* dan Evaluasi, dan Pembiayaan. Berikut penjabaran dari masing-masing dimensi pada Perwal No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.

1) Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan

Dimensi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan dalam Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah dimensi yang menduduki peringkat pertama dalam urgensi karena meliputi dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pertanian Kota

Semarang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pertanian Kota Semarang yang berjalan konsisten hingga saat ini. Di samping Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Pertanian Kota Semarang, antusias masyarakat juga tinggi dalam membudayakan gerakan pertanian perkotaan. Dinas Pertanian Kota Semarang selalu mengadakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pertanian perkotaan seperti mengadakan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi. Bidang Hortikultura dan Bidang Penyuluhan beserta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selalu memantau perkembangan kelompok tani dan menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

2) Fasilitasi Pertanian Perkotaan

Dimensi Fasilitasi Pertanian Perkotaan pada Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menempati urutan ketiga dalam urgensitasnya. Fasilitas yang diberikan dari Dinas Pertanian Kota Semarang berupa bibit, alat peraga, atau dana yang menunjang kelompok tani untuk melaksanakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

3) *Urban Farming Corner*

Dimensi *Urban Farming Corner* pada Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menempati urutan ke empat dalam urgensitasnya. *Urban Farming Corner* adalah tempat edukasi bagi masyarakat Kota Semarang yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertanian perkotaan. *Urban Farming Corner* juga menjadi tempat pemasaran produk olahan kelompok tani sekaligus tempat konsultasi persoalan pertanian perkotaan. Dalam Bab IV Pasal 12 Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021, untuk mewujudkan pemberian pelayanan pertanian perkotaan yang terintegrasi maka diwujudkan melalui *urban farming corner* yang meliputi sosialisasi, pelatihan, konsultasi, pelayanan kunjungan lokasi, dan promosi.

4) *Monitoring* dan Evaluasi

Dimensi *Monitoring* dan Evaluasi pada Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menempati urutan ke lima dalam urgensitasnya. *Monitoring* dan Evaluasi dari Dinas Pertanian Kota Semarang dilaksanakan setiap tahun dan dari hasil evaluasi, yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang membutuhkan pengendalian OPT dan juga pendampingan.

5) Pembiayaan

Dimensi Pembiayaan pada Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menempati urutan ke dua dalam

urgensitasnya. Pembiayaan menjadi urutan ke dua karena apabila hanya mendapat dukungan dari Pemerintah saja dan tidak ada anggaran yang disediakan, Implementasi Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 tidak akan bisa berjalan.

4.1.2 Dalam pengimplementasian kebijakan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil analisis, peneliti dapat memberikan penjabaran kesimpulan mengenai faktor pendorong dengan acuan teori dari Edward III sebagai berikut :

1) Komunikasi

Dimensi komunikasi dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang, seperti sosialisasi, edukasi, konsultasi, pelayanan kunjungan lokasi, dan promosi. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk ke dalam dimensi komunikasi karena mencakup penyampaian informasi terhadap kelompok tani atau masyarakat dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Informasi disampaikan dari Dinas Pertanian Kota Semarang kepada kelompok tani melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai perantara.

2) Sumber Daya

Dimensi sumber daya dapat dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya yang dimiliki dalam

implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah cukup memadai. Sumber daya manusia, yaitu meliputi Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pertanian Perkotaan, dan kelompok tani sebagai sasaran program. Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Sumber daya peralatan atau sarana prasarana diberikan oleh Dinas biasanya berupa uang tunai, bibit, pupuk, atau media tanam.

3) Disposisi

Dimensi disposisi dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan dapat dilihat dari karakter *stakeholder* yang terlibat. *Stakeholder* di sini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang yang memahami dan saling mempercayai satu sama lain. Dinas Pertanian Kota Semarang ingin mengencarkan pertanian perkotaan kepada seluruh masyarakat dan hal ini menjadi motivasi bagi para *staff* untuk terus melakukan kegiatan penunjang *urban farming*.

4) Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan dapat dilihat dari *Standard Operational Procedure* (SOP) dan juga fragmentasi. Dinas Pertanian Kota Semarang melaksanakan setiap kegiatan salah satu contohnya seperti *monitoring* dan evaluasi sesuai dengan SOP yang ada. Berkaitan dengan pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian

perkotaan, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai penanggung jawab kebijakan melibatkan Bidang Hortikultura sebagai bidang yang menangani persoalan pertanian perkotaan serta melibatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai perantara antara Dinas Pertanian Kota Semarang dengan kelompok tani.

5) Dukungan Publik

Dimensi dukungan publik dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan dapat dilihat dari dukungan masyarakat. Dinas Pertanian Kota Semarang sudah melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, pelatihan, konsultasi, dan promosi kepada kelompok tani dan masyarakat. Kelompok tani yang ada masih aktif dan ikut serta dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan, namun masih terdapat masyarakat yang sulit untuk dihibau dan belum sadar akan pentingnya membudayakan *urban farming*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Implementasi Perwal No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, peneliti masih menemukan beberapa permasalahan yang sudah dijabarkan. Saran yang dapat peneliti sampaikan agar Implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang lebih baik ke depannya, adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi persoalan terkait anggota kelompok tani yang dalam usia tidak produktif, Dinas Pertanian Kota Semarang perlu lebih gencar dalam menghimbau lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan khususnya generasi muda. Hal tersebut diperlukan untuk mempersiapkan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan kedepannya agar lebih maksimal. Menghimbau masyarakat bisa dilakukan dengan cara promosi melalui sosial media ataupun terjun secara langsung. Apabila Dinas Pertanian Kota Semarang sudah melakukan kegiatan yang menghimbau masyarakat tetapi masih belum maksimal, alangkah baiknya jika Dinas Pertanian Kota Semarang lebih giat lagi dan lebih berinovasi untuk menghimbau masyarakat.
2. Dalam rangka mengatasi persoalan hama tanaman, Dinas Pertanian Kota Semarang memerlukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) beserta pendampingan yang bertujuan agar tanaman tidak mudah dirusak oleh hama atau gulma. Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT (Pengendalian Hama Terpadu) yang meliputi kegiatan pemantauan dan pengendalian. Pengendalian OPT biasanya dilakukan oleh perorangan, kelompok dalam masyarakat, atau badan hukum yang menguasai tentang tanaman.
3. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, Dinas Pertanian Kota Semarang diharapkan dapat memberi sarana dan prasarana yang sesuai dengan lingkungan kelompok tani.